

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Provinsi, Sumatera Selatan

Telp/Fax : (0714) 321013 / (0714) 322447 Kode Pos : 30711

Email : polppkabupatenmuba@gmail.com Website : satpolpp@mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 343 /KPTS-SATPOLPP/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Musi Banyuasin tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. ✓ Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang nomor 92 tahun 2024 Tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 90);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini yang merupakan bagian tidak terpisakan.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman Rencana Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.
- KETIGA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemantauan dan mengevaluasi capaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Sekayu

Pada tanggal : 24 Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 198810 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Provinsi, Sumatera Selatan

Telp/Fax : (0714) 321013 / (0714) 322447 Kode Pos : 30711

Email : polppkabupatenmuba@gmail.com Website : satpolpp@mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 127 /KPTS-SATPOLPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026, dipandang perlu membuat dokumen Perubahan Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang nomor 92 tahun 2024 Tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
 - b. Menyajikan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
 - c. Menyusun Rencana Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Sekayu
Pada tanggal : 11 Maret 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 198810 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR : 127 /KPTS-SAT.POL.PP/2025
TANGGAL : 11 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN MUSI
BANYUASIN TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025.**

Ketua Tim : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Musi Banyuasin
Sekretaris Tim : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Musi Banyuasin
Kelompok Kerja : 1. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang
Penegakan Peraturan Daerah
2. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang Sumber
Daya Aparatur
4. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang
Perlindungan Masyarakat
5. Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang
Pemadam Kebakaran
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
Staf
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan dan Staf
8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Staf

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 198810 1 002

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan dari Rencana Strategis (RENSTRA) dijabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelenggarakan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tupoksi yang lebih referensif, dengan meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan melalui penguatan/ pementapan peran forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) berbasis masyarakat (battom-up planning) dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana aparatur serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten.

Dalam Perubahan Rencana Kerja pada tahun 2025 ini ditetapkan rencana capaian atau target Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dengan didukung oleh 4 program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dalam rangka untuk mendukung Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Keberhasilan dalam pelaksanaan renja ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat dimanfaatkan dan berguna bagi kita semua, terutama dalam upaya peningkatan pembangunan Polisi Pamong Praja kabupaten Musi Banyuasin.

SEKAYU, 24 Juli 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671227 198810 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
3.3 Program dan Kegiatan	33
Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
Bab VIII. PENUTUP.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renca Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin	16
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja	24
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran	32
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan harus bersifat menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman. Perencanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sistem pembangunan perencanaan nasional telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Didalam Undang-undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang di sebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan di sebut rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan di sebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), untuk rencana lima tahunan Perangkat Daerah di sebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah).

Penyusunan Rencana Kerja bagi suatu instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan kepentingan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten. Perlu menyusun rencana strategis sebagai acuan bagi penyusunan Program tahunan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Muba dan Perubahan RPJMD Kab. Muba Tahun 2023 - 2026.

Berkenan dengan konsep Pemerintah Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan dan keleluasan kepada Pemerintah daerah untuk mengembangkan Daerahnya sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi, Peran serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta, serta memperkuat keanekaragaman potensi daerah.

Untuk mengembangkan daerah perlu mengerahkan semua potensi Kabupaten Musi Banyuasin baik Topografi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya manusia, Kependudukan, Sosial Budaya dan pemerintahan, sehingga setiap kondisi akan saling berintegrasi. Untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya perlu direncanakan agar kegiatan yang satu tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kegiatan lain, paling tidak meminimalisir pengaruh yang tidak diinginkan. Oleh karena itu tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian harus secara nyata dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab sehingga akan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan melihat jauh kedepan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apabila penyusunan perencanaan disusun dengan mengenyampingkan keseimbangan dan jauh dari konsep logis serta tidak bertitik tolak dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka dalam proses pelaksanaannya nanti akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang nomor 92 tahun 2024 Tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar pelayanan minimal (SPM);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 (lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 nomor 8);

16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah. Satuan Polisi pamong Praja telah mempunyai rencana Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sehingga tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusun Rencana Strategis Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong praja yang transparan, partisipasif, dan akuntabel;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan subtansi perencanaan yang lebih jelas, Rinci dan terukur guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dibidang menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten. Mengacu pada RPJMD Kab. Muba 2023-2026 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang;

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Polisi Pamong Praja melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi dari Renja ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan matrik penulisan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan perkiraan capaian tahun berjalan serta Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang

telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7:6x100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan Sangat Tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
05 01 2.01 06	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
05	01	02	02	-	-	-	-	1 Paket	-	11=(10/4)
05	01	02	02	100%	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
05	01	03	04	100%	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
05	01	04	05	100%	1 Paket	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%
05	01	07	06	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
05	01	08	08	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
05	01	09	09	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1	05	01	2.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7:6x100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10:4)
05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	100%	34 Unit	34 Unit	100%	34 Unit	34 Unit	100%
05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	23 Unit	23 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = $(7:5 \times 100\%)$	9	10 = $(5+7+9)$	11 = $(10/4)$
05	02	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Output : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	391 Orang	0 Orang	0%	391 Orang	0 Orang	0%
05	02	06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
05	02	12	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Output : Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	6 Orang	-	-	6 Orang	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7:6x100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	02	01	14	-	-	-	-	40 Orang	0 Orang	0%
05	02	01	15	91 Kasus	100%	91 Kasus	100%	91 Kasus	91 Kasus	100%
05	02	01	16	13 Kasus	100%	13 Kasus	100%	13 Kasus	13 Kasus	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7:6x100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	02	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
05	02	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	193 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
1	05	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05	02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3 Laporan	-	-	3 Laporan	0 Laporan	0%
05	02	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5 Laporan	0 Laporan	0%	5 Laporan	0 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7x100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05	02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Output : Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	7 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	700%	1 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	2 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	200%
1	05	03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	-	-	100%	0%	0%
05	03	2. 01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Output : Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	40 Orang	-	-	40 Orang	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7:6x100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
05	04	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Output :	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
05	04	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Output :	1 Unit	100%	-	-	2 Unit	0%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam melaksanakan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- b) Program / Kegiatan yang memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - e. Penyediaan Bahan/Material
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- c. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- e. Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- f. Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.1.2 Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Capaian 2024 (%)
1	Penegakan Perda	%	100	100
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten	%	100	100
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten/Kota	Orang	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya	200
4	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah	%	85	100

	layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			
--	---	--	--	--

2. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran dirinci sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024	Capaian 2024(%)
1	Tercapainya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1)	Penegakan Perda	100	100
		2)	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten	100	100
		3)	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten/Kota	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya	200
2	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dalam kota kabupaten	1)	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85	100

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok dibidang menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota

dalam Kabupaten. Batasan mengenai kewenangan Sat Pol PP sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat ;
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah ;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah; dan
- f. Urusan kebakaran kota dalam kabupaten

Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Sat Pol PP memiliki kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azazi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. Melaporkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- e. Menyerahkan kepada PPNS daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah; dan
- f. Melaksanakan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.

Indikator yang dikaji adalah :

- a. Penegakan Perda
- b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten
- c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
- d. Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat di Tabel II.2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(7)	(8)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	
1	Penegakan Perda	-	✓	100%	-	-	-	100%	100%	-	-		
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kententraman dan keindahan) di Kabupaten	-	✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	-	✓	1 Orang setiap RT atau Sebutan Lainnya	1 Orang setiap RT atau Sebutan Lainnya	1 Orang setiap RT atau Sebutan Lainnya	1 Orang setiap RT atau Sebutan Lainnya	7 Orang setiap RT atau Sebutan Lainnya	2 Orang setiap RT atau Sebutan Lainnya	1 Orang setiap RT atau Sebutan Lainnya	1 Orang setiap RT atau Sebutan Lainnya		

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(7)	(8)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	✓	✓	85%	85%	85%	85%	100%	100%	85%	85%		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Permasalahan dalam melaksanakan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;

- a. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum hal ini dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di ruang publik.
- b. Terhadap penertiban WTS yang terjaring razia, penyelesaian terhadap sanksi yang bersangkutan belum optimal dan.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah :

a. Faktor Eksternal

Belum optimalnya sistem, peraturan dan kebijaksanaan Negara dalam hal melindungi warga Negara dan penduduk, terutama berkaitan dengan:

- 1) Ketertiban Umum
- 2) Keamanan
- 3) Linmas dan
- 4) Hak-Hak sipil (baik dari segi hukum maupun HAM)
- 5) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran

b. Faktor Internal

Pelaksanaan pembangunan di bidang menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten, secara umum telah meningkat dengan baik dengan perangkat pendukung diantaranya :

- 1) SDM Sat Pol PP
- 2) Kelembagaan Sat Pol PP Telah tersedia dan terbentuk dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kondisi ideal

- 3) Namun masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya armada kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam dan sarana prasarana lainnya

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional :

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri. Pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2016.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.

1. Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya, guna menegakan peraturan Daerah sering kali dihadapkan pada suatu dilema. Disatu sisi Sat Pol PP bertugas untuk menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten, disisi lain Sat Pol PP harus berhadapan

dengan masyarakat yang merasa terganggu dengan penertiban yang dilakukan.

Terhadap upaya penertiban yang dilakukan oleh Sat Pol PP di lapangan seringkali dianggap sebagai musuh rakyat kecil. Banyaknya tanggapan dan reaksi masyarakat bahkan para elite masyarakat yang menganggap bahwa Polisi pamong Praja sebagai musuh Rakyat Kecil dan sebagai alat penguasa dan pengusaha. Menanggapi adanya opini tersebut, seluruh jajaran Sat Pol PP harus menyikapi dan memahaminya secara konstruktif dan menjadi penyemangat bagi Sat Pol PP untuk tidak menjadi lemah dan mundur ke belakang.

Sebagai Sat Pol PP, yang bertugas menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten, harus perlu didukung dengan profesionalisme kelembagaan agar citra yang buruk dimasyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja tidak semakin kurang baik dalam melakukan tindakan untuk menjalankan tupoksinya. Untuk mewujudkan sosok aparat Sat Pol PP yang profesional di masa yang akan datang, saat ini sedang terus dimatangkan bersama kantor Menpan adanya jabatan fungsional di lingkungan Sat Pol PP.

Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian Sat Pol PP dalam melakukan tindakan dan perbuatan :

a) Aspek Sosial

Mempelajari kehidupan sosial masyarakat, budaya, tingkah laku dan pola kehidupan dengan pendekatan kehidupan lingkungan disekitar, agar dapat berinteraksi dengan kepentingan dan keputusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepentingan umum.

b) Aspek Psikologis

Dalam melakukan suatu tindakan perlu memperhatikan perasaan masyarakat sehingga mendapat simpati dan dukungan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dengan keputusan yang akan dilaksanakan untuk mendapat sanksi dari tindakan dan perbuatan pemerintah dalam mengambil keputusan.

c) Aspek Hukum

Perlu ketegasan, disiplin dan kekuatan dalam menjalankan keputusan pemerintah dalam mengambil tindakan, sehingga dapat menimbulkan rasa jera terhadap apa yang dilakukan, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan dan fasilitas umum.

Karena itu, peranan dan fungsi Sat Pol PP sebaiknya lebih diarahkan kepada tindakan yang bersifat "*preventif* " dan "*persuasive*" dalam melakukan pembinaan trantib dan linmas tersebut. Supaya lebih menggunakan azas penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari aspek "keputusan pemerintah" (*behoorlijkbestuur*), yaitu dengan menggunakan azas "*Preventive Rechtsszorg*", yaitu suatu prinsip yang menjaga, memelihara, dan mencegah agar segala peraturan hukum dan perundang-undangan tidak dilanggar dan ditaati oleh warga masyarakat, jangan dibiarkan rakyat melanggar dulu baru ditindak, misalnya, kalau ada warga masyarakat yang mendirikan kios/bangunan atau PKL di tempat-tempat terlarang, seperti di trotoar, di jalur hijau, di bantaran sungai dll, harus dicegah, jangan ditunggu tumbuh beratus-ratus, kemudian baru dijadikan proyek penggusuran dengan paksa, sehingga timbul perlawanan-perlawanan yang akhirnya merusak citra Sat Pol PP.

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh budaya masyarakatnya, tugas yang diemban oleh Sat Pol PP tentunya merupakan salah satu upaya dalam memajukan bangsanya

memalui suatu peran dalam mendidik bangsanya untuk taat pada hukum dan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya akan menciptakan suatu masyarakat yang tertib dan dapat hidup dengan tenteram.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten, dengan demikian bila kita cermati dengan seksama esensi pengaturan tersebut, Tugas yang diemban oleh Polisi Pamong Praja adalah merupakan tugas yang sangat berat dan mempunyai nilai yang sangat strategis dalam menjaga kewibawaan dan kehormatan Dearah yang dituangkan dalam kebijakan daerah (Perda/Keputusan KDH) serta menjaga situasi yang memungkinkan Pemda dan masyakarat melakukan aktivitasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perda merupakan suatu keputusan politik tingkat lokal yang disusun sebagai hasil kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemda yang dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Oleh karena itu, Polisi Pamong Praja sebagai perangkat dari Pemerintah Daerah dalam menegakan Perda seyogyanya dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya mendapat perlindungan dan dukungan politik tingkat lokal sepanjang dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya mengedepankan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Guna meredam opini dan citra negatif dari Sat Pol PP, adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah (pusat dan Daerah), perlu dicari solusi dan inovasi agar Sat Pol PP menjadi teman, sahabat dan kehadirannya selalu dicintai masyarakat.

2. Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pantauan, beberapa daerah sudah mulai melakukan inovasi dalam memunculkan citra positif dari Sat Pol PP dengan menjalankan operasi simpatik dan mengedepankan dialog dalam menjalankan operasinya. Hal tersebut dipandang sebagai bentuk terobosan yang positif untuk secara bertahap menghilangkan image yang negatif dari Sat Pol PP.

Untuk itu seluruh jajaran Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dinamika masyarakat dan meningkatkan kinerja untuk menjadi profesional. Jajaran Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menjalin koordinasi dan sinergis dengan aparaturnya terkait terutama dengan jajaran kepolisian.

Sebagai bagian integral dari aparat Pemda, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas harus senantiasa menjunjung disiplin yang tinggi, bijaksana, dan memelihara jiwa korsa dengan tetap memperhatikan rambu-rambu Hak Azasi Manusia.

Melihat proses panjang perjalanan keberadaan Sat Pol PP, yang dimulai sejak VOC menduduki Batavia, pasca proklamasi kemerdekaan dan era otonomi Daerah, terdapat banyak tantangan dalam melaksanakan tugasnya, terlebih setelah era otonomi daerah mulai diberlakukan, namun demikian terdapat pula keberhasilan yang dilaksanakan oleh Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya. Suatu organisasi akan tumbuh dan berkembang senantiasa selalu mendapat ujian dan tantangan dalam pertumbuhannya, hal tersebut identik dengan Sat Pol PP yang sampai saat ini masih tetap berkibar dan harum namanya meskipun sering mendapat cacian dan image yang negatif dalam pelaksanaan tugasnya.

Inovasi dan kreasi dalam menjalankan operasional Sat Pol PP dilapangan sangat diperlukan guna meredam image negatif

yang selama ini selalu menyertai penyelenggaraan tugas Sat Pol PP dilapangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kedepan:

1. Kewajiban Bupati untuk lebih memberi peran kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan kebijakan yang mendukung eksistensi Satuan polisi Pamong Praja secara optimal dengan meningkatkan kualitas personil, pembiayaan dan sarana prasarana.

5. Formulasi Isu-isu penting

Metode yang digunakan dan penentuan isu – isu strategis digunakan dengan menganalisa faktor eksternal dan internal yang berdasarkan permasalahan dan pendukung yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Meningkatkan keperluan sarana dan prasarana Sat Pol PP dalam rangka melaksanakan pengawasan dan menegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten melalui kegiatan Oprasional.
2. Meningkatkan kerjasama antara lintas sektoral dalam menjaga dan menegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten melalui kegiatan Oprasional.
3. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat

serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten melalui kegiatan Oprasional.

4. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan personil melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 tidak ada perubahan dan sesuai dengan Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan dan Anggaran di tahun 2025.

Adapun proses yang dilakukan untuk menetapkan Program/Kegiatan dan Anggaran sesuai dengan Kebutuhan yang melalui proses penguatan/pemantapan peran forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berbasis masyarakat (*bottom-up planning*) dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tupoksi guna peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat di Tabel II.3 tentang Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel II.3
Review terhadap RKPD dan P-RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama PD : Satuan Polisi pemong Praja

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)			Ket
			RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan Sangat Tepat	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan Sangat Tepat	100%	100%	Rp 21.315.643.436	Rp 32.257.371.190	Rp 10.941.727.754	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 137.761.000	Rp 101.472.000	Rp (36.289.000)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Muba	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 66.985.000	Rp 49.881.000	Rp (17.104.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Rp 38.448.000	Rp 29.088.000	Rp (9.360.000)	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Muba	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 32.328.000	Rp 22.503.000	Rp (9.825.000)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 11.702.794.937	Rp 24.264.892.331	Rp 12.562.097.394	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muba	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	582 Orang	Rp 11.702.794.937	Rp 24.264.892.331	Rp 12.562.097.394	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 121.093.250	Rp 116.357.250	Rp (4.736.000)	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Muba	Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 121.093.250	Rp 116.357.250	Rp (4.736.000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 226.609.900	Rp 73.903.000	Rp (152.706.900)	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Muba	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	Rp 132.758.900	Rp -	Rp (132.758.900)	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Muba	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	Rp 93.851.000	Rp 73.903.000	Rp (19.948.000)	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)				Ket
			RKPD	P-RKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang		
(1)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Muba	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	Rp 811.979.488	Rp 586.967.047	Rp (225.012.441)			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Muba	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 8.397.874	Rp 14.858.074	Rp 6.460.200			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Muba	Output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 52.808.486	Rp 52.808.486	Rp -			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Muba	Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 161.603.223	Rp 96.699.038	Rp (64.904.185)			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Muba	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 113.138.871	Rp 74.792.165	Rp (38.346.706)			
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Muba	Output : Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Output : Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp -			
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Output : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Rp 15.080.000	Rp 7.500.000	Rp (7.580.000)			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Rp 212.042.000	Rp 175.344.000	Rp (36.698.000)			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 7.002.361.999	Rp 5.606.675.200	Rp (1.395.686.799)			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 67.350.888	Rp 75.765.600	Rp 8.414.712			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 6.935.011.111	Rp 5.530.909.600	Rp (1.404.101.511)			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 1.313.042.862	Rp 1.507.104.362	Rp 194.061.500			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muba	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Rp 84.230.000	Rp 84.230.000	Rp -			

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)			Ket
			RKPD		P-RKPD		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Muba	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	Rp 1.121.950.000	Rp 1.121.950.000	Rp -	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Muba	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 Unit	23 Unit	Rp 94.662.862	Rp 89.964.862	Rp (4.698.000)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Muba	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	Rp -	Rp 198.759.500	Rp 198.759.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Muba	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	Rp 12.200.000	Rp 12.200.000	Rp -	
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kententrman dan keindahan) di Kabupaten		Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kententrman dan keindahan) di Kabupaten		100%	100%	Rp 2.484.450.710	Rp 1.625.459.710	Rp (858.991.000)	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	Rp 1.798.665.250	Rp 1.059.690.250	Rp (738.975.000)	
	Kordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 196.500.000	Rp 105.750.000	Rp (90.750.000)	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Muba	Output : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Output : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Output : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Output : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 98.846.000	Rp 53.099.000	Rp (45.747.000)	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Muba	Output : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Output : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Output : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Output : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	391 Orang	0 Orang	Rp 165.557.000	Rp -	Rp (165.557.000)	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Muba	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 176.850.000	Rp 176.850.000	Rp -	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)			Ket
			RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PFngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kab. Muba	Output : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Output : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	0 Orang	12 Orang	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Kab. Muba	Output : Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Output : Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	6 Orang	0 Orang	Rp 145.886.000	Rp -	Rp (145.886.000)	
	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Muba	Output : Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Output : Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	40 Orang	40 Orang	Rp 276.950.000	Rp 18.315.000	Rp (258.635.000)	
	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Muba	Output : Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Output : Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	91 Kasus	91 Kasus	Rp 421.425.000	Rp 308.625.000	Rp (112.800.000)	
	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Muba	Output : Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Output : Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	13 Kasus	13 Kasus	Rp 47.416.000	Rp 47.416.000	Rp -	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	4 Laporan	4 Laporan	Rp 230.520.000	Rp 221.520.000	Rp (9.000.000)	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Muba	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tersedia	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	Rp 38.715.250	Rp 38.715.250	Rp -	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	Rp 685.785.460	Rp 565.769.460	Rp (120.016.000)	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)			Ket
			RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3 Laporan	3 Laporan	Rp 88.973.460	Rp 88.973.460	Rp -	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5 Laporan	5 Laporan	Rp 54.912.000	Rp 24.996.000	Rp (29.916.000)	
	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepetuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepetuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Laporan	5 Laporan	Rp 541.900.000	Rp 451.800.000	Rp (90.100.000)	
3	Program Penanggulangan Bencana		Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	1 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	Rp 603.825.040	Rp 534.583.537	Rp (69.241.503)	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp 44.843.040	Rp 22.851.537	Rp (21.991.503)	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Kab. Muba	Output : Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Output : Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	40 Orang	40 Orang	44.843.040	22.851.537	Rp (21.991.503)	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Rp 558.982.000	Rp 511.732.000	Rp (47.250.000)	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Output : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Output : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang	490.982.000	453.482.000	Rp (37.500.000)	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Output : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Output : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	68.000.000	58.250.000	Rp (9.750.000)	

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)			Ket
			RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	85%	Rp 4.998.389.000	Rp 4.998.931.000	Rp 542.000	
			Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp 4.998.389.000	Rp 4.998.931.000	Rp 542.000		
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 643.389.000	Rp 593.931.000	Rp (49.458.000)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Muba	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana untuk pencegahan dan pengurangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana untuk pencegahan dan pengurangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	2 Unit	4 Unit	Rp 4.355.000.000	Rp 4.405.000.000	Rp 50.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

1. Proses Program/Kegiatan Pemangku Kepentingan

Adapun proses hasil kegiatan terhadap program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin yang di usulkan para pemangku kepentingan melalui kegiatan terhadap telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis dan berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota:

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3. Program Penanggulangan Bencana :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran:

1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota:

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

2. Kesesuaian Usulan Program/Kegiatan Dikaitkan Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan tentang proses program/kegiatan usulan pemangku kepentingan yang dikaitkan dengan isu-isu penting/strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keperluan sarana dan prasarana Sat Pol PP dalam rangka melaksanakan pengawasan dan menegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten melalui kegiatan Oprasional.

- b. Meningkatkan kerjasama antara lintas sektoral dalam menjaga dan menegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten melalui kegiatan Operasional.
- c. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten melalui kegiatan Oprasional.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personil yang profesional, diantaranya dengan mengoptimalkan pembinaan personil melalui pemahaman tugas dan fungsi secara periodik.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat di Tabel II.4 tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian		Pagu Anggaran		
			RKPD	P-RKPD		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan Sangat Tepat	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan Sangat Tepat	100%	100%	Rp 21.315.643.436	Rp 32.267.371.190	Rp 10.941.727.754	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 137.761.000	Rp 101.472.000	Rp (36.289.000)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 66.985.000	Rp 49.881.000	Rp (17.104.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Muba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Rp 38.448.000	Rp 29.088.000	Rp (9.360.000)	
	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 32.328.000	Rp 22.503.000	Rp (9.825.000)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 11.702.794.937	Rp 24.264.892.331	Rp 12.562.097.394	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	582 Orang	Rp 11.702.794.937	Rp 24.264.892.331	Rp 12.562.097.394	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 121.093.250	Rp 116.357.250	Rp (4.736.000)	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 121.093.250	Rp 116.357.250	Rp (4.736.000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 226.609.900	Rp 73.903.000	Rp (152.706.900)	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Muba	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	Rp 132.758.900	Rp -	Rp (132.758.900)	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Muba	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	Rp 93.851.000	Rp 73.903.000	Rp (19.948.000)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 811.979.488	Rp 586.967.047	Rp (225.012.441)	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Anggaran		
			RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)		(3)							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 8.397.874	Rp 14.858.074	Rp 6.460.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 208.909.034	Rp 124.965.284	Rp (83.943.750)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Muba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 52.808.486	Rp 52.808.486	Rp -
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Muba	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 161.603.223	Rp 96.669.038	Rp (64.904.185)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Muba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 113.138.871	Rp 74.792.165	Rp (38.346.706)
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Muba	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp -
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Muba	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Rp 15.080.000	Rp 7.500.000	Rp (7.580.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Rp 212.042.000	Rp 175.344.000	Rp (36.698.000)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 7.002.361.999	Rp 5.606.675.200	Rp (1.395.686.799)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 67.350.888	Rp 75.765.600	Rp 8.414.712
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 6.935.011.111	Rp 5.530.909.600	Rp (1.404.101.511)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 1.313.042.862	Rp 1.507.104.362	Rp 194.061.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Muba	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	Rp 84.230.000	Rp 84.230.000	Rp -

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian		Pagu Anggaran		
			RKPD	P-RKPD		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Muba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		34 Unit	34 Unit	Rp 1.121.950.000	Rp 1.121.950.000	Rp -
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Muba	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		23 Unit	23 Unit	Rp 94.662.862	Rp 89.964.862	Rp (4.698.000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Muba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	1 Unit	Rp -	Rp 198.759.500	Rp 198.759.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20 Unit	20 Unit	Rp 12.200.000	Rp 12.200.000	Rp -
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kententraman dan keindahan) di Kabupaten	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kententraman dan keindahan) di Kabupaten		100%	100%	Rp 2.484.450.710	Rp 1.625.459.710	Rp (858.991.000)
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	Rp 1.798.665.250	Rp 1.059.890.250	Rp (738.975.000)
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 196.500.000	Rp 105.750.000	Rp (90.750.000)
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Muba	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 98.846.000	Rp 53.099.000	Rp (45.747.000)
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Muba	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		391 Orang	0 Orang	Rp 165.557.000	Rp -	Rp (165.557.000)
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan		1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 176.850.000	Rp 176.850.000	Rp -

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian		Pagu Anggaran		
			RKPD	P-RKPD		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kab. Muba	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	0 Orang	12 Orang	Rp	Rp	Rp 89.400.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Kab. Muba	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	6 Orang	0 Orang	Rp	Rp	Rp (145.886.000)
	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Muba	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	40 Orang	40 Orang	Rp	18.315.000 Rp	Rp (258.635.000)
	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penanganan, dan Pengawasan	Kab. Muba	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penanganan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penanganan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penanganan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	91 Kasus	91 Kasus	Rp	421.425.000 Rp	308.625.000 Rp (112.800.000)
	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Muba	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	13 Kasus	13 Kasus	Rp	47.416.000 Rp	Rp -
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab. Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	4 Laporan	4 Laporan	Rp	230.520.000 Rp	221.520.000 Rp (9.000.000)
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	Rp	38.715.250 Rp	Rp -
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	Rp	685.785.460 Rp	565.769.460 Rp (120.016.000)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3 Laporan	3 Laporan	Rp	88.973.460 Rp	Rp -

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian		Pagu Anggaran		
			RKPD	P-RKPD		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Muba	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Rp 54.912.000	Rp 24.996.000	Rp (29.916.000)
	Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Rp 541.900.000	Rp 451.800.000	Rp (90.100.000)
	3 Program Penanggulangan Bencana		Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	1 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	100%	Rp 603.825.040	Rp 534.583.537	Rp (69.241.503)
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Rp 44.843.040	Rp 22.851.537	Rp (21.991.503)
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Kab. Muba	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	40 Orang	40 Orang	40 Orang	44.843.040	22.851.537	Rp (21.991.503)
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	Rp 558.982.000	Rp 511.732.000	Rp (47.250.000)
	Pencarian, Perlindungan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang	10 Orang	490.982.000	453.482.000	Rp (37.500.000)
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	100 Orang	68.000.000	58.250.000	Rp (9.750.000)
	4 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	85%	85%	85%	Rp 4.998.389.000	Rp 4.998.931.000	Rp 542.000

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian		Pagu Anggaran		
			RKPD	P-RKPD		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	Rp 4.998.389.000	Rp 4.998.931.000	Rp 542.000
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		1 Laporan	1 Laporan	Rp 643.389.000	Rp 593.931.000	Rp (49.458.000)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Muba	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait		2 Unit	4 Unit	Rp 4.355.000.000	Rp 4.405.000.000	Rp 50.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 15 Kecamatan, 13 Kelurahan, 227 Desa dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, keputusan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran dari pada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban, disamping itu di setiap Desa/Kelurahan ada Kaur Ketentraman dan Ketertiban yang bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada

setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Sat Pol PP Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, Kepala Satuan dimaksud secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing Kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Dari tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Reformasi Birokrasi
2. Terwujudnya penegakan peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam Kabupaten.

b. Sasaran

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Tercapainya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Meningkatnya pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana kebakaran kota dalam kabupaten.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA tahun 2024, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai Quality Assurance dan Consulting bagi Bupati Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja

program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran terdapat 4 Indikator yaitu

Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Sumber Data	Rumus Perhitungan (IKU)/ Penjelasan	Target Kinerja				
									2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penegakan peraturan daerah, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1.1	Tercapainya ketertiban dan keamanan masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin	1.1.1	Penegakan Perda	%	Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{jumlah penegakan perda}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan) di Kabupaten	%	Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
				1.1.3	Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten/Kota	Orang	Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah Satuan Linmas}}{\text{Jumlah RT atau Sebutan Lainnya}}$	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya	1 Orang setiap RT atau sebutan lainnya
		1.2	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dalam kota kabupaten	1.2.2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran } (<1\text{jam setelah pengaduan})}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$	80%	85%	85%	85%	85%
2	Reformasi Birokrasi	2.1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	%	Satpol PP	$\frac{\text{Jumlah Kebutuhan yang terpenuhi}}{\text{Total Kebutuhan yang seharusnya ada}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program Dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :**

1) Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin masuk ke dalam Visi yaitu Maju Lebih Cepat, Bersama Mensejahterahkan Musi Banyuasin dan misi IV (empat) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif dan Melayani.

2) Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan yaitu Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan akuntabel melalui penguatan kebijakan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

3) Pencapaian SPM

Adapun indikator Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota
- b) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- c) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja yaitu 4 program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.
2. Total Kebutuhan dana / pagu Indikatif yang dirincikan menurut sumber pendanaanya adalah Rp. 39.416.345.437,- Sumber pendanaan dari APBD Kab. Muba

c. Penjelasan Rumusan Program/Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

Pada tahun 2025 rumusan program/kegiatan/sub kegiatan dengan rancangan awal PRKPD baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan pagu indikatif sudah sesuai dengan analisa kebutuhan di Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun anggaran 2025.

Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat di Tabel III.2 tentang Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel III.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah P-RKPD Tahun 2024
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)		
				RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah / Berkurang (9)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan Sangat Tepat	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan Sangat Tepat	100%	100%	Rp 21.315.643.436	Rp 32.257.371.190	Rp 10.941.727.754
1	05	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 137.761.000	Rp 101.472.000	-Rp 36.289.000
05	01	2. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 66.985.000	Rp 49.881.000	-Rp 17.104.000
05	01	2. 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Rp 38.448.000	Rp 29.088.000	-Rp 9.360.000
05	01	2. 01	Penyelenggaraan Walidata Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 32.328.000	Rp 22.503.000	-Rp 9.825.000
1	05	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 11.702.794.937	Rp 24.264.892.331	Rp 12.562.097.394
05	01	2. 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	582 Orang	Rp 11.702.794.937	Rp 24.264.892.331	Rp 12.562.097.394
1	05	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 121.093.250	Rp 116.357.250	-Rp 4.736.000
05	01	2. 03	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 121.093.250	Rp 116.357.250	-Rp 4.736.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)					
(1)		(2)	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah / Berkurang			
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	05	01	2.05	01	100%	100%	Rp	226.609.900	Rp	73.903.000	Rp	152.706.900
05	01	2.05	02		1 Paket	0 Paket	Rp	132.758.900	Rp	-	-Rp	132.758.900
05	01	2.05	09		15 Orang	15 Orang	Rp	93.851.000	Rp	73.903.000	-Rp	19.948.000
1	05	01	2.06	01	100%	100%	Rp	811.979.488	Rp	586.967.047	-Rp	225.012.441
05	01	2.06	01		1 Paket	1 Paket	Rp	8.397.874	Rp	14.858.074	Rp	6.460.200
05	01	2.06	02		1 Paket	1 Paket	Rp	208.909.034	Rp	124.965.284	-Rp	83.943.750
05	01	2.06	03		1 Paket	1 Paket	Rp	52.808.486	Rp	52.808.486	Rp	-
05	01	2.06	04		1 Paket	1 Paket	Rp	161.603.223	Rp	96.699.038	-Rp	64.904.185
05	01	2.06	05		1 Paket	1 Paket	Rp	113.138.871	Rp	74.792.165	-Rp	38.346.706
05	01	2.06	07		1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	Rp	-
05	01	2.06	08		1 Laporan	1 Laporan	Rp	15.080.000	Rp	7.500.000	-Rp	7.580.000
05	01	2.06	09		2 Laporan	2 Laporan	Rp	212.042.000	Rp	175.344.000	-Rp	36.698.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)		
			RKPD	P-RKPD		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah / Berkurang
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Rp 7.002.361.999	Rp 5.606.675.200	-Rp 1.395.686.799
05	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp 67.350.888	Rp 75.765.600	Rp 8.414.712
05	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 6.935.011.111	Rp 5.530.909.600	-Rp 1.404.101.511
1	05	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Rp 1.313.042.862	Rp 1.507.104.362	Rp 194.061.500
05	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp 84.230.000	Rp 84.230.000	Rp -
05	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	34 Unit	Rp 1.121.950.000	Rp 1.121.950.000	Rp -
05	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 Unit	23 Unit	23 Unit	Rp 94.662.862	Rp 89.964.862	-Rp 4.698.000
05	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	1 Unit	Rp -	Rp 198.759.500	Rp 198.759.500
05	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Rp 12.200.000	Rp 12.200.000	Rp -
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	Rp 2.484.450.710	Rp 1.625.459.710	-Rp 858.991.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)		
		RKPD	P-RKPD	(3)	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah / Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp 1.798.665.250	Rp 1.059.690.250	-Rp 738.975.000	
05	02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 196.500.000	Rp 105.750.000	-Rp 90.750.000	
05	02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 98.846.000	Rp 53.099.000	-Rp 45.747.000	
05	02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	391 Orang	0 Orang	Rp 165.557.000	Rp -	-Rp 165.557.000	
05	02 2.01 06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 176.850.000	Rp 176.850.000	Rp -	
05	02 2.01 10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	0 Orang	12 Orang	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	
05	02 2.01 12	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	6 Orang	0 Orang	Rp 145.886.000	Rp -	-Rp 145.886.000	
05	02 2.01 14	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	40 Orang	40 Orang	Rp 276.950.000	Rp 18.315.000	-Rp 258.635.000	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)		
			RKPD	P-RKPD		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah / Berkurang (9)
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	91 Kasus	91 Kasus	Rp 421.425.000	Rp 308.625.000	-Rp 112.800.000
05	02	2.01	16	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	13 Kasus	13 Kasus	Rp 47.416.000	Rp 47.416.000	Rp -
05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	4 Laporan	4 Laporan	Rp 230.520.000	Rp 221.520.000	-Rp 9.000.000
05	02	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	Rp 38.715.250	Rp 38.715.250	Rp -
1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	Rp 685.785.460	Rp 565.769.460	-Rp 120.016.000
05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3 Laporan	3 Laporan	Rp 88.973.460	Rp 88.973.460	Rp -
05	02	2.02	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	5 Laporan	5 Laporan	Rp 54.912.000	Rp 24.996.000	-Rp 29.916.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)		
			RKPD	P-RKPD	(4)	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah / Berkurang
(1)		(2)	(3)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
05	02	12	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		5 Laporan	5 Laporan	Rp 541.900.000	Rp 451.800.000	-Rp 90.100.000
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	1 Orang Setiap RT atau Sebutan Lainnya	Rp 603.825.040	Rp 534.583.537	-Rp 69.241.503
1	05	03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp 44.843.040	Rp 22.851.537	-Rp 21.991.503
05	03	2.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	40 Orang	40 Orang	Rp 44.843.040	Rp 22.851.537	-Rp 21.991.503
1	05	03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Rp 558.982.000	Rp 511.732.000	-Rp 47.250.000
05	03	2.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	10 Orang	Rp 490.982.000	Rp 453.482.000	-Rp 37.500.000
05	03	2.03	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	Rp 68.000.000	Rp 58.250.000	-Rp 9.750.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp)			
(1)		(2)	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	Bertambah / Berkurang	
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	85%	Rp 4.998.389.000	Rp 4.998.931.000	Rp 542.000	
1	05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp 4.998.389.000	Rp 4.998.931.000	Rp 542.000	
05	04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 643.389.000	Rp 593.931.000	-Rp 49.458.000	
05	04 2.01 17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk pencegahan dan pengurangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk pencegahan dan pengurangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	2 Unit	4 Unit	Rp 4.355.000.000	Rp 4.405.000.000	Rp 50.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Rencana Kerja

Renja Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 ada 4 program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material

- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota:

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3. Program Penanggulangan Bencana :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran:

1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota:

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

1.2 Pendanaan

Total Kebutuhan dana/ pagu Indikatif yang dirincikan menurut sumber pendanaanya adalah Rp. 39.416.345.437,- Sumber pendanaan dari Dana APBD Kab. Muba.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin yang akan digunakan dalam Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta pencegahan dan penanggulangan Bencana Kebakaran kota dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam tahun 2023 – 2026. Sedangkan **tujuan** yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah Reformasi Birokrasi, dan Terwujudnya penegakan peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran dalam Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan **sasaran** yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Tercapainya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin, Meningkatnya pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana kebakaran kota dalam kabupaten.

Meskipun Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal ini dimasukan saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

SEKAYU, 24 Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671227 198810 1 002